

Chi Minh. Sebaliknya, Cina menuduh Vietnam memprovokasinya karena pernah melakukan latihan menembak di salah satu pesisir. Cina berusaha bernegosiasi dengan negara-negara lain yang menginginkan kedaulatan di Laut Cina Selatan. Namun Cina cenderung ingin bersepakat di belakang layar, yang kemudian ditentang pihak seberang meja dengan membawa isu ini ke mediasi internasional.

Salah satu hasil mediasi internasional adalah Konvensi PBB tahun 1982 yang mencantumkan kesepakatan berisi kerangka solusi. Saat dipraktikkan, konvensi itu malah memicu salip-menyalip pengakuan kedaulatan. Konvensi itu juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap klaim historis Cina dan Vietnam atas Paracel dan Spratly. Pada 4 November 2002, ASEAN dan Cina juga mendeklarasikan kesepakatan kode etik, salah satunya menyelesaikan sengketa tanpa ancaman atau penggunaan senjata. Filipina dan Vietnam juga telah mempunyai perjanjian bilateral dengan Cina, namun perjanjian itu hampir tidak berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Selain keenam negara yang bersengketa, Amerika Serikat juga punya kepentingan di laut tersebut. Kepentingan ini berhubungan dengan fakta Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran lebih dari setengah perdagangan dunia. Ada pula kepentingan militer, sehingga tak heran Amerika Serikat menempatkan pos militernya di sana. Walau menyatakan akan bersikap netral, ternyata Paman Sam memberikan bantuan militer kepada sekutu lamanya, Filipina. (BBC (online) :15 Desember 2015)

Klaim Cina sepihak pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan adalah milik Cina membuat Laut Cina Selatan telah menjadi fokus dari sengketa maritim di Asia. Dua dari negara penuntut adalah

Cina dan Taiwan, sementara empat lainnya – Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam – adalah anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Meskipun ASEAN sendiri sebagai organisasi bukan salah satu pihak yang bersengketa, organisasi ini memiliki kepentingan agar sengketa di kawasannya diselesaikan dengan damai tanpa memengaruhi kebebasan navigasi internasional.

Indonesia juga memiliki posisi yang sama. Indonesia bukan pihak yang menuntut dalam sengketa ini, namun negara Indonesia akan terkena imbas jika terjadi konflik di Laut Cina Selatan karena interpretasi dari “nine-dash line” atau sembilan garis terputus di peta Cina, yang mengklaim sekitar 90% dari perairan yang luasnya 3,5 juta kilometer persegi (atau 1,35 juta mil persegi). Karena kepentingan strategis dan ekonomis dari perairan tersebut, maka isu ini telah menjadi permasalahan internasional yang juga melibatkan Amerika Serikat. Wall Street Journal (online), 16 Desember 2015)

### **Respon Indonesia atas Klaim Cina terhadap Kepulauan Natuna**

Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa Klaim Cina atas Kepulauan Natuna mendapatkan reaksi dari Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, persoalan klaim Kepulauan Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar kepulauan yang berpotensi tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan oleh Cina. “Permasalahan bukan pada klaim kepulauannya, tetapi di perairan sekitar Kepulauan Natuna,” kata Hikmahanto saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 November 2015 Tempo (online), 15 Desember 2015.

Pemerintah Indonesia masih mengutamakan jalur dialog dalam menyikapi